

**KAJIAN MENGENAI KURIKULUM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA**

Skripsi

**Diajukan untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

Nurul Hidayatul Aliyah Lestariana Setiyorini

NIM : 9871433

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan BPN merupakan tempat penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPN. Berdiri sejak tahun 1993, dalam rentang waktu 9 tahun perjalanannya, ternyata masih banyak mendapat kritikan. Salah satunya adalah mengenai alumni STPN yang dianggap masih belum mampu melaksanakan tugas. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kualitas alumni, yaitu mahasiswa dan proses pendidikan. Proses pendidikan terdiri dari beberapa hal salah satunya adalah kurikulum. Berdasarkan pada hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kurikulum Diploma IV STPN dalam kaitannya dengan tuntutan kedinasan dan pelaksanaan tugas alumni di Kantor Pertanahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Kurikulum Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dengan tuntutan kedinasan dan kesesuaian dengan pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan.

Dalam menjelaskan fenomena di atas, digunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dalam menjangkau informasi. Informasi utama dikoleksi dari individu-individu yang secara langsung berusaha untuk menerapkan ilmu yang didapat, sesuai dengan kurikulum, dalam hal ini alumni STPN yang bertugas di Kantor Pertanahan. Sedangkan informasi tambahan digali dari atasan langsung dan rekan sekerja serta unsur-unsur lain dengan menggunakan teknik bola salju dalam penjangkauannya.

Data yang dihasilkan adalah data primer berupa transkrip wawancara yang memperlihatkan bahwa masih ada kelemahan-kelemahan disamping kelebihan dari kurikulum D IV Pertanahan STPN Yogyakarta. Hasil analisa data primer tersebut, didukung dengan hasil analisa kurikulum secara normatif.

Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan 2 kesimpulan yaitu : pertama, kurikulum Diploma IV sudah mampu mengakomodasi tuntutan kedinasan namun masih tetap harus dilakukan pembenahan. Kedua, kurikulum Diploma IV Pertanahan belum mampu sepenuhnya menunjang pelaksanaan tugas di Kantor Pertanahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pemikiran.....	11
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	13
B. Sumber Informasi.....	14

BAB IV.	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	15
	B. Alumni STPN	18
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kesesuaian Kurikulum Diploma IV dengan Tuntutan Dinas	20
	B. Kesesuaian Kurikulum dengan Pelaksanaan Tugas	47
BAB VI.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas sudah menambah ke segala bidang, termasuk bidang pertanahan. Tugas-tugas dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Kantor-kantor Pertanahan diseluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan teknis maupun pelayanan non teknis.

Tugas-tugas dibidang pertanahan bukanlah suatu tugas yang ringan. Hasil dari pelayanan, baik secara teknis maupun non teknis, harus bisa diandalkan. Diandalkan disini maksudnya adalah dalam tertib kelakuan dan perlakuan hukum. Bahkan salah satu produk Kantor Pertanahan, yaitu sertifikat, merupakan produk yang berkekuatan hukum dalam hal pembuktian, baik dalam tindakan sehari-hari maupun saat terjadi sengketa.

Mengingat beratnya beban tugas di bidang pertanahan, agar semua dapat berjalan diatas relnya, dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dan profesional yang mampu menangani dan mengelola tugas tersebut. Tenaga ahli dan profesional yang dimaksud disini adalah tenaga yang mempunyai kecakapan, kemahiran dan keterampilan untuk membina, mengembangkan dan atau melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan tanah, pengaturan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah serta

pendidikan dan latihan dibidang pertanahan yang mendasar, menyeluruh dan mempunyai cakrawala pemikiran jauh ke depan, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sejenak.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah salah satu tempat untuk menempa dan meningkatkan mutu serta kualitas sumber daya manusia dilingkungan Badan Pertanahan Nasional. Sebagai salah satu-satunya Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, sesuai Keppres No. 25/1993, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang Pertanahan.

Namun ternyata, ketika tenaga-tenaga tersebut diturunkan di lapangan, banyak sekali sorotan-sorotan yang diarahkan kepada mereka. Salah satunya adalah kurang handalan mereka dalam menjalankan tugas. Komentar ini, tentu saja mengundang rasa ingin tahu yang besar, terutama dari pihak Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan juga pihak lain yang terkait, dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berawal dari hal tersebut, pada tahun 1998, Puslitbang Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan suatu penelitian terhadap alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang bertugas di PAP untuk membuktikan kebenaran pendapat itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kinerja lulusan STPN tidak jauh berbeda dengan non STPN.
2. Beberapa kelemahan yang menonjol dari lulusan STPN, yang bekerja di PAP, terlihat pada kegiatan pengumpulan data awal, komunikasi dengan masyarakat, dan pengisian blanko DI-201. Pada beberapa responden juga dijumpai kelemahan pada pembuatan SK Hak Atas Tanah dan Pembuatan Laporan Akhir. Dari kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditelusuri sumber masalahnya, yang mungkin terdapat dalam Sistem Pendidikan di STPN, tapi mungkin juga luarnya.
3. Dibandingkan dengan tenaga S-1 baru atau tenaga lama bukan Sarjana, lulusan STPN juga mempunyai beberapa kelebihan dalam kinerjanya, misalnya dalam teori-teori ilmu pertanahan (MKK).

Dari hasil penelitian tersebut, nampak bahwa masih ada kelemahan alumni STPN dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Hal itu merupakan salah satu indikasi bahwa ternyata kualitas alumni belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Untuk itulah, maka peneliti tertarik untuk menindaklanjuti penelitian tersebut, dengan meneliti kurikulum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Sebagaimana layaknya suatu institusi pendidikan lain, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional juga memiliki kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu menjadi pijakan dalam proses perkuliahan. Selama ini, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam rangka penulisan skripsi masih berkisar mengenai

Penguasaan Tanah. Dari hasil penelitian mereka, hambatan dalam pelaksanaan tugas adalah faktor sumber daya manusianya yang kurang memadai.

Melihat hal yang demikian, penulis sebagai bagian dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tergerak untuk berusaha mengenali potensi yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu di bidang kurikulum, guna membuka jalan bagi optimalisasi fungsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dimasa depan. Berangkat dari alasan itulah, maka penulis tertarik untuk mengajukan suatu usulan penelitian tentang:

“KAJIAN MENGENAI KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA IV
PERTANAHAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi diri adalah dengan mengenali kemampuan dan keterbatasan diri, yaitu dengan mengenali kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), Kesempatan (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threat*).

Untuk mengetahui apakah kurikulum yang ada sekarang merupakan salah satu unsur kekuatan atau unsur kekurangan, kita perlu meneliti dan mengkajinya lebih lanjut.

Rumusan permasalahan itu dapat diperinci menjadi :

1. Apakah Kurikulum Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai dengan kebutuhan kedinasan di Badan Pertanahan Nasional ?
2. Bagaimanakah relevansi kurikulum Program Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Pertanahan.

C. Pembatasan Masalah

Kalau masalah sudah diperoleh perlu ditentukan ruang lingkungannya. Hal ini penting sekali supaya peneliti jangan terjerumus dalam sekian banyak data yang ingin diteliti (Koentjaraningrat, 1983 : 28).

1. Kurikulum Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta pada tahun 1997.
2. Penelitian dilakukan pada kesesuaian kurikulum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan fungsi dan peranan Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1998.
3. Penelitian mengenai relevansi kurikulum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional sejak tahun 1998.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui bagaimana kurikulum program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
 - b. Mengetahui kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan kedinasan di Badan Pertanahan Nasional.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah adanya suatu harapan bahwa hasil penelitian ini :
 - a. Bisa menjadi sarana bagi seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk lebih mengenal Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional itu sendiri.
 - b. Sebagai masukan dalam pengembangan kurikulum Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional selanjutnya.
 - c. Sebagai pelopor dalam rangka penelitian lanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian Kurikulum dengan tuntutan kedinasan

Melihat hasil penelitian dimana sebetulnya STPN punya potensi untuk bisa di kembangkan sebagai pusat informasi pertanahan, hal itu tercermin dari komposisi yang terdapat di dalam Kurikulum Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, bisa dikatakan kurikulum kita sudah sesuai. Dikatakan sesuai, karena sudah mampu mengakomodasi sebagian besar fungsi-fungsi Badan Pertanahan secara normatif. Dari 145 SKS sebagian besar sudah mampu menjawab tuntutan kedinasan .

Namun sayangnya unsur-unsur lain dari kurikulum belum bisa mendukung pelaksanaannya secara konsisten. Prosentase sebesar itu belum berimbang dalam proporsinya. Masih terdapat konsentrasi mata kuliah pada beberapa fungsi yaitu :

- a. Fungsi perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan serta pembuatan peta dasar pendaftaran tanah, sebanyak 24 SKS

2. Kesesuaian Kurikulum dengan pelaksanaan tugas

Salah satu indikasi kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaan tugas adalah kemampuan kerja alumni dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan. Selain pujian akan kelebihan alumni dalam melaksanakan tugas, ternyata masih terdapat keluhan, baik dari alumni maupun rekan sekerja atas kinerja tersebut berkaitan dengan minimnya bekal pengetahuan suatu bidang tugas.

Alumni STPN banyak menuai pujian di bidang tugas teknis yaitu dalam hal pengukuran di lapang, penggambaran, pembuatan peta, revisi peta dan pengisian daftar isian. Juga untuk hal-hal seperti pengetikan surat dinas, pembuatan laporan bulanan dan pelaksanaan tugas lapang.

Sedangkan untuk hal-hal yang masih mendapat keluhan adalah kurangnya kemampuan dan pengetahuan alumni dalam bidang :

1. Pembuatan konsep surat keputusan
2. Penyuluhan kepada masyarakat
3. Pengelolaan arsip, ATK, warkah dan sertipikat
4. Pembuatan telaah staff dan prosedur beracara di Pengadilan.

semuanya memerlukan proses. Untuk itu ada baiknya, kalau perbaikan itu dilakukan dari sedikit dan bertahap. Yang bisa disarankan untuk pembenahan adalah sebagai berikut :

1. Sudah saatnya STPN menyiapkan diri, melepaskan selubung birokrasi dan berdiri secara mandiri dengan diberi otonomi seluas-luasnya sebagai suatu lembaga akademik untuk memajukan diri.
2. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membenahi kurikulum D IV sebelum semuanya menjadi terlambat. Adapun pembenahan kurikulum itu dapat dimulai dengan :
 - a. Menyeimbangkan proporsi mata kuliah
 - b. Memasukkan materi-materi yang terkait dengan fungsi pengelolaan dan pengorganisasian serta tata laksana dalam SAP dan Silabus
 - c. Memperdalam pemberian materi untuk mata kuliah Manajemen Perkantoran, Manajemen Pertanahan, Administrasi Pembangunan, Manajemen Proyek dan Kualitas.
 - d. Memperbesar porsi praktek untuk beberapa mata kuliah yaitu Mata Kuliah Pengaturan Penguasaan Tanah di Indonesia, Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, dan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran

- e. Menata ulang sistem yang ada sehingga bisa kembali kepada visi dan misi STPN sebagaimana tercantum dalam Keputusan KBPN No.3 Tahun 1995 tentang Statuta STPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik, Oemar, (1978) , *Pembinaan Pengembangan Kurikulum* , Pustaka Martiana , Bandung .
- Mikulas, William L, *Concepts of Learning* , W.B. Saunders Company, Philadelphia.
- Moleong, Lexy. J (2001), *Metode Penelitian Kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya Offset , Bandung.
- Mulyadi, Usman . Wiryokusumo, Iskandar , (1988) , *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* , Bina Aksara Jakarta.
- _____, (1994), *Kurikulum untuk Abad 21*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- _____, (1998) , *Buku Pedoman Tahun Ajaran 1998/1999*, STPN , Jogjakarta.
- Romine, Stephen , (1954), *Building The High School Curriculum*, The Ronald Press Comp , New York.
- Supandi, *Dasar-Dasar Pengelolaan Kurikulum* , Bina Aksara , Jakarta.
- Suryo Suwaryono, P. Risnarto, (1998) , *Kinerja alumni STPN* , Buletin BPN, Humas BPN Pusat.
- Webster's New International Dictionary, (1953), Second Edition (Unabridged) GC Merriam Company, Springfield Mass:

Himpunan Peraturan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional .
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.
5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 299- XV – 2000 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan Pada STPN Yogyakarta.